

**ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERAPAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
(Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso)**

Moh. Mashudi Arif

ariefmashudi8@gmail.com

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Jember

Hendrawan Santosa Putra

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Jember

Taufik Kurrohman

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Jember

Abstract

The purpose of this study was to describe the eventual regency government readiness in implementing SAP accrual. The indicators used to assess the readiness include commitment/ integrity, human resources, facilities, and information systems. In addition this study will also describe the conditions and obstacles that occur during the preparation period and will provide an overview of SAP's strategy of accelerating the implementation of accrual through internal and external analysis. This study used a qualitative approach with quantitative tools as a medium for describing readiness. The data used is primary data obtained from observations, interviews and questionnaires. The results of this study explains that when viewed in terms of commitment, human resources, facilities, and information systems the regency government can be categorized quite ready in the analysis in general. This indicates that most on education still has the ability and capacity to implement accrual-based SA . based on the percentage of readiness on education , 50 % on education categorized as "less", while the "good" only 3.8 % remaining in the category of "pretty" by 46.2 %. The analysis of each variable is also not much different, of the four variables used commitment, human resources, and infrastructure criteria entered into the "pretty" and only variables or indicators of system information that has the criteria of "good". The results of the road map analysis explaining that the regency government has some weaknesses and obstacles in implementing SAP accrual. The weaknesses include the lack of qualified human resources and infrastructure as well as less than the maximum support from the leadership on education. Strategies that can be used by the regency government as a form of accelerated accrual of SAP implementation, namely the aggressive strategy.

Keywords: *SAP Accrual, Readiness, Commitment, Human Resources, Infrastructure, Information Systems*

1 PENDAHULUAN

Reformasi keuangan pemerintah pada tahun 2003 ditandai dengan diberlakukannya Undang-undang No. 17 Tahun 2003. Pasal 36 UU No. 17 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa Pemerintah Indonesia diharuskan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan berbasis akrual selambat-lambatnya lima tahun setelah peraturan tersebut ditetapkan. Artinya Pemerintah Indonesia harus sudah melaksanakan pengelolaan keuangan basis akrual pada tahun 2008 (Nordiawan, 2008). Namun yang terjadi adalah sampai saat ini pemerintah masih belum melaksanakan amanat tersebut. Perkembangan akuntansi pemerintahan pun ditandai dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang penggunaan Standar Akuntansi Pemerintah (Berbasis *Cash Toward Accrual*) sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Pemberlakuan SAP CTA tersebut bertujuan agar SAP CTA bisa menjembatani pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan berbasis akrual.

Pada tahun 2010 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang penggunaan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Pemerintah merencanakan bahwa SAP akrual selambat-lambatnya harus dilaksanakan pada tahun 2015. Selama rentang waktu tersebut diharapkan seluruh elemen pemerintahan berbenah untuk menyiapkan hal tersebut mulai dari menyiapkan sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana, sistem informasi, dan pemerintah harus memiliki komitmen dan integritas yang tinggi untuk melaksanakan SAP akrual (Mulyana, 2009)

Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso (Pemkab Bondowoso) juga merupakan entitas pemerintah yang harus melaksanakan SAP berbasis akrual. Sebagai entitas pemerintah, Pemda Bondowoso menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai sumber pendanaan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Untuk itu sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas Pemda Bondowoso juga harus melaporkan pengelolaan keuangan atas APBD tersebut kepada *stakeholder* berdasarkan aturan yang berlaku yakni dengan menggunakan SAP berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 tahun 2010. Untuk mengatasi hal tersebut Pemda Bondowoso harus mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP berbasis akrual. Persiapan yang memadai mulai dari peningkatan kemampuan SDM, pengadaan sarana dan prasarana yang kompatibel, menyiapkan segala macam sistem informasi terkait dengan penerapan SAP berbasis akrual.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana kesiapan yang telah dilakukan oleh Pemda Bondowoso terkait dengan penerapan SAP berbasis akrual pada tahun 2015 mendatang. Kesiapan yang dilakukan dilihat dari perspektif SDM, sarana prasarana, dan sistem informasi, serta komitmen dari pejabat publik yang diperlukan untuk implementasi SAP berbasis akrual. Oleh karena itu judul yang diangkat dalam penelitian ini “Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso)”. Penelittian ini merupakan replikasi dari beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan. peneliti ingin mengetahui apakah indikasi keterlambatan penerapan